**KONTRIBUSI TEORI BARANG PUBLIK TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Umi Muzakiyatul laila 1\*, Taufik Kurniawan 2, Rosada 3 , Julia Nur Aini 4 , Fauzan Ramli 5

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi

\*email: [muzakiya16@gmail.com](mailto:muzakiya16@gmail.com)

**Abstrak :**  Barang publik merupakan barang yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan dapat diperoleh tanpa biaya. Dalam konteks Islam, masyarakat berhak mengetahui informasi dan merasakan manfaat dari barang yang disediakan pemerintah, seperti pertahanan umum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis kontribusi barang publik terhadap kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dasar, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan aspek keamanan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Pendidikan dasar dianggap sebagai barang publik karena memenuhi kriteria non-rival consumption dan non-exclusion. Layanan kesehatan, sebagai barang publik, harus mudah diakses tanpa biaya. Infrastruktur yang memadai mempercepat pembangunan ekonomi, sementara keamanan yang baik meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

**Kata Kunci**: Public Goods 1; Sosial Walfare 2; Kesejahteraan 3

**Abstract**: restricted in their use and can be obtained at no cost. In the Islamic context, society has the right to access information and benefit from goods provided by the government, such as public defense, education, health, infrastructure, and security. This study employs a qualitative method through literature review to analyze the contribution of public goods to social welfare. The findings indicate that primary education, health services, infrastructure development, and security aspects have a significant impact on social welfare. Primary education is considered a public good as it meets the criteria of non-rival consumption and non-exclusion. Health services, as public goods, should be easily accessible at no cost. Adequate infrastructure accelerates economic development, while good security enhances community comfort and satisfaction.

**Keywords**: 1 Public Goods ; Social Welfare 2; Welfare 3

**PENDAHULUAN**

Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabial dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. (Rohima, 2020, hlm. 33–34) Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi. (Rosmanidar, 2020, hlm. 252)

Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan umum. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat. (Rohima, 2020, hlm. 33–34)

Aktivitas pemerintah dapat mempunyai eksternalitas yang penting. Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan umum. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pemerintah menyediakan banyak barang publik kepada masyarakat. Sekilas, pemerintah tidak jauh berbeda dengan organisasi lain seperti serikat pekerja, asosiasi profesional, atau bahkan perkumpulan seperti klub mahasiswa. Mereka memberikan manfaat dan menciptakan kewajiban bagi para anggotanya. Namun lebih dari itu, organisasi pemerintah berbeda, terutama karena mereka dapat mencapai skala ekonomis dan karena pemerintah mempunyai kemampuan untuk membiayai aktivitas mereka melalui pendapatan pajak. (Idris, 2018, hlm. 13–14)

**KAJIAN TEORI**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara barang publik dan kesejahteraan sosial. Teori pertama adalah teori utilitarianisme. Teori ini menyatakan bahwa utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis tau etika dalam Islam disebut Ahlak (Moshinsky yang menempatkan tindakan tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna yang bermanfaat (berfaedah) dan menguntungkan sedangkan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. (Muharir & Haryono, 2023, hlm. 110)

Teori Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik). Misalnya vaksin COVID-19 sebagai barang publik akan terus berkembang sesuai waktu dikarenakan untuk saat ini kebutuhan masyarakat akan produksi vaksin tersebut sangatlah tinggi. Menurut Robert. H. Brook dalam Dadan Darmawan dan Rismawati, kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi jiwa yang sehat di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu:

a. gaya hidup (life style);

b. lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya);

c. pelayanan kesehatan;

d. faktor genetik (keturunan). (Ahsan, 2022, hlm. 604)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Dalam studi literatur/studi kepustakaan juga dikaji hal-hal yang bersifat empiris dan bersumber dari temuan-temuan penelitian terdahulu yang dilakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. (Sundari, t.t., hlm. 74–75)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Barang publik belum tentu dikatakan publik, karena untuk mendapatkannya harus perlu usaha dan mengeluarkan sesuatu, semestinya barang publik dapat dinikmati masyarakat tanpa persaingan . Menurut Grace dalam sejauh pendidikan menyediakan kondisi dasar untuk memungkinkan demokrasi, ia memiliki klaim langsung atas status menjadi barang publik. Barang publik pada hakikatnya adalah layanan publik yang diinginkan, yang meningkatkan kualitas hidup semua warga negara, dan yang memfasilitasi perolehan kompetensi moral, intelektual, kreatif, ekonomi dan politik oleh warga tersebut, terlepas dari kemampuan warga tersebut untuk membayar layanan tersebut. (syukron & Zahruddin, 2022, hlm. 847)

Barang publik yang disediakan pemerintah ada 2 :

a. Barang Publik Murni

Barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publikmurni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain, yang dapat dinilai. Sebuah barang publik murni memiliki dua sifat berikut: - Non-dikecualikan. Jika kepentingan publik diberikan, konsumen tidak dapat dikecualikan dari konsumsi Non-persaingan. Konsumsi barang publik oleh salah satu konsumen tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi oleh negara lainnya Sebaliknya, barang swasta sifatnya dikecualikan dan perlu adanya persaingan di dalamnya, yang artinya jika dikonsumsi oleh satu orang maka tidak ada yang tersisa untuk yang lain. Meskipun barang swasta tidak dibuat eksplisit, sifat-sifat suatu barang swasta secara tidak langsung telah berlaku implisit dalam bagaimana kita telah menganalisis perilaku pasar dalam bab-bab sebelumnya.

b. Barang Publik Tidak Murni

Barang tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni dan barang swasta murni. Dalam praktik, barang publik akhirnya cenderung menderita kemacetan ketika penggunaan cukup besar. Contoh jelas termasuk taman dan jalan. Kemacetan menghasilkan pengurangan dalam pengembalian barang publik kepada setiap pengguna sebagai akibat meningkatnya penggunaan pasokan yang diiringi oleh peningkatan rumah tangga. Barang publik tersebut disebut barang publik tidak murni. Utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi naik dari tingkat pasokan dan fungsi penurunan dari segi penggunaannya. (Rohima, 2020, hlm. 35–36)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang publik memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial melalui berbagai aspek.

**a. Pertama: Aspek Pendidikan**

Barang publik (public goods) adalah suatu jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tak ada di seorang pun yang bersedia untuk menghasilkannya. Ada dua sifat pokok dari barang ini, yaitu non rival consumption dan Non exclusion. Berdasarkan definisi dan sifat-sifat dari barang publik tersebut, agar pendidikan dapat digolongkan sebagai barang publik, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan harus merupakan barang/jasa konsumsi.

2. Pendidikan dibutuhkan semua orang

3. Pihak swasta tidak bersedia untuk menghasilkannya.

4. Pendidikan, konsumsinya mempunyai sifat non rival consumption dan non exclusion.

Sesuai dengan kriteria tersebut, maka pendidikan dasar atau wajib belajar terdiri dari SD dan SLTP dapat digolongkan sebagai barang publik. Ada beberapa teori yang mendasari tentang barang publik. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh Boen, Eric Lindahl, dan Samuelson. Ketiga teori tersebut, pada prinsipnya membahas tentang bagaimana pengadaaan dan pembebanan biayanya. Pengadaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, seperti sebuah SLTP, sebuah SMU, dan sebagainya.

Di Indonesia telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar sebagai pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat (4): (syukron & Zahruddin, 2022, hlm. 846)

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Kedua :Aspek Kesehatan**

Secara konstitusional, kesehatan adalah hak dari setiap individu/manusia yang menjadi kewajiban dari pemerintah/pemimpin untuk dapat memenuhinya. (Ahsan, 2022, hlm. 604)

Vaksin sebagai barang publik tentu seharusnya bisa diakses dengan mudah oleh semua pihak hal ini sebagai bentuk peran pemerintah terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Perluasan target Vaksinasi Gotong Royong diharapkan dapat meningkatkan persentase masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Akan tetapi prinsip berbayar pada Vaksinasi Gotong Royong tentu tidak dibenarkan, sebab ini menyalahi komitmen Presiden Joko Widodo sendiri yang menyatakan vaksin diberikan secara gratis pada konferensi pers 12 Desember 2020. (Ahsan, 2022, hlm. 603)

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dalam hal ini vaksin sendiri berkategori barang publik yang seharusnya pembiayaan dibebankan pada sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahwa disebutkan pula dalam penjelasannya bahwa aspek kesehatan dalam hal ini sebagai contoh obat untuk flu burung masuk dalam kategori pembiayaan oleh APBN dan/atau APBD. (Ahsan, 2022, hlm. 604)

**Ketiga: Aspek Infrastruktur**

Pembangunan suatu Infrastruktur adalah suatu yang sangat penting dan berarti untuk mempersingkat proses pembangunan nasional ataupun regional. Infrastruktur memegang kendali yang sangat vital sebagai roda pacu penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu wilayah tidak bisa dibedakan dari ketersediaan infrastruktur contohnya transportasi, telekomunikasi dan sanitasi. Inilah yang menjadi penyebab pembangunan infrastruktur menjadi asas dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terdapat penambahan infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah akan diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian.

Pembangunan Infrastruktur suatu daerah bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan publik baik itu dari perekonomian ataupun sosial. Pembangunan Infrastruktur akan mencukupi dari segi kebutuhan hidup primer dan sekunder. Pembangunan Infrastruktur merupakan aktivitas yang menjadi prioritas yang harus dipersiapkan dan direncanakan di suatu wilayah atau perkotaan. Pembangunan Infrastruktur membutuhkan pendekatan yang intens dan tepat dalam hal perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di suatu wilayah agar berdampak kepada publik. Pembangunan Infrastruktur harus menjadi dampak langsung yang bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh semua lapisan publik. (Cornelius & Primandhana, 2022, hlm. 339)

Pembangunan infrastruktur yang mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi, termasuk transformasi digital, sangat penting dalam mendorong perekonomian, terutama kegiatan perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. (Orinaldi, 2021, hlm. 396)

Kinerja lingkungan dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini didasarkan bahwa dengan adanya perhatian pihak perusahaan dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan atau menjalankan kegiatan operasional yang tidak merusak lingkungan. (Khairiyani dkk., 2019, hlm. 47)

Menurut pasal 4 peraturan pemerintah No.105 tahun 2000 terkait pengurusan tanggung jawab keuangan daerah, disebutkan dimana pengelolaannya perlu dilaksanakan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan regulasi, tepat guna, transparan, serta efektif dan akuntabel melalui atensi terkait asas ketaatan serta keadilan. Pemerintah daerah mengurus keuangan pada APBD. (jumiati dkk., 2022, hlm. 2)

Sebagai contoh Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) merupakan simbol negara, sekaligus sebagai marwah, harga diri dan martabat negara dan bangsa. (Hafiz & Kurniawan, 2020, hlm. 57)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, penyediaan infrastruktur bagi masyarakat meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial. Ini meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, fasilitas kesehatan, kawasan, pariwisata, lembaga permasyarakatan, dan perumahan rakyat. (Abdullah, 2020, hlm. 108)

**Keempat : Aspek Keamanan**

Aspek keamanan meliputi fitur-fitur seperti sistem keamanan dalam kendaraan, penerangan yang memadai di area publik, pengamanan terhadap kehilangan barang bawaan, dan tindakan pencegahan kejahatan. Pengguna yang merasa aman dan terlindungi cenderung merasa lebih nyaman dan puas saat menggunakan sarana transportasi. (Siregar, 2023, hlm. 10)

**KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa barang publik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendidikan dasar, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan aspek keamanan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai hal terkait permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri. Strategi yang tepat dalam menyediakan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan rakyat dalam mengatasi masalah-masalah sosial sangat penting untuk

dikaji lebih lanjut.Teori Negara Kesejahteraan (welfare state) pernah diperkenalkan oleh Spicker (Suharto,2005) yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Pendidikan dasar memenuhi kriteria sebagai barang publik karena sifat non-rival consumption dan non-exclusion. Layanan kesehatan sebagai barang publik harus tersedia tanpa biaya untuk menjamin akses yang merata. Infrastruktur yang baik mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keamanan yang memadai juga menambah kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan barang publik untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. T. (2020). Model Public Private Partnership Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia dan India. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, *9*(2), 102. https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.102-114.2020

Ahsan, F. (2022). DEREGULASI TERHADAP PARADOKS VAKSIN COVID-19 SEBAGAI BARANG PUBLIK DAN VAKSIN BERBAYAR DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021. *Jurnal hukum dan pembangunan*, *52*(4).

Cornelius, D., & Primandhana, W. P. (2022). *Analisis pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan air terhadap produk domestik regional bruto*. *19*(2).

Hafiz, A. P., & Kurniawan, B. (2020). DAMPAK WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DINAMIKA PEREKONOMIAN DI PALANGKA RAYA. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, *4*(1), 56. https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i1.531

Idris, A. (2018). *EKONOMI PUBLIK*. Deepublish.

jumiati, J., prasaja, A. S., & anita, E. (2022). *Jurnal pendidikan dan konseling*, *4*(2).

Khairiyani, K., Mubyarto, N., Mutia, A., Zahara, A. E., & Habibah, G. W. I. A. (2019). KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, *3*(1), 41. https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.248

Muharir, & Haryono, S. (2023). KONSEP UTILITARIANISME JHON STUART MILL RELEVANSINYA TERHADAP BEHAVIORAL ECONOMICS. *economic Sharia jurnal: Jurnal Pemikiran dan pengembangan ekonomi syariah*, *9*(1).

Orinaldi, M. (2021). Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, *6*(2), 391. https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.301

Rohima, S. (2020). *Ekonomi Publik*. UNSRI PRESS.

Rosmanidar, E. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) Based on Islamic Social Reporting in an Effort to Increase Company Value: A Literature Review. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, *7*(2).

Siregar, I. A. (2023). *Urban Mobility Peran Desain produk dalam pengembangan elektrifikasi mikromobilitas*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Sundari, U. Y. (t.t.). *Metodologi Penelitian*. CV. Gita Lentera.

syukron, M., & Zahruddin. (2022). PENDIDIKAN SEBAGAI BARANG ATAU JASA PUBLIK DAN SWASTA. *Y A S I N Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, *2*(6).

Am, S., & Harun, H. (2023). *Determining Qibla Direction of Mosques in Jambi Province : Method , Conflict , and Resolution*. *01*(01), 166–186.

Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *16*(1), 151–174. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174

As’ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, *14*(1), 71–84. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513

As’ad, A., Fridiyanto, F., & Rafi’i, M. (2021). The Battle of Student Ideology at State Islamic Higher Education: Activism of Gerakan Mahasiswa Pembebasan and Student Element Resistance. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *25*(1), 75. https://doi.org/10.29300/madania.v25i1.4493

As’ad, Putra, D. I. A., & Arfan. (2021). Being al-wasatiyah agents: The role of azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *11*(2), 124–145. https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07

As’ad, Rahmat Basuki, F., Fridiyanto, & Suryanti, K. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains. *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan*, *36*(1), 89–108. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.89-108

Asad, A. (2021). From Bureaucratic-Centralism Management to School Based Management: Managing Human Resources in the Management of Education Program. *Indonesian Research Journal in Education |IRJE|*, *5*(1), 201–225. https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947

Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTROPHIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, *16(1)* 15–29. https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29

Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *15*(2), 337–360. https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360

Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student’s Purchase Intention Behavior on Halal Food: Schools Clustering Perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 26–34. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.13092

Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). *Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society*. https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372

Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *36*(01). http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A

Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The Impact of Islamic Financial Development, GDP, and Population on Environmental Quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *13*(1), 7–13. https://doi.org/10.32479/ijeep.13727

Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, *November*. https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059

Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *13*(1), 151–170. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347

Putra, D. . A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic Exegesis Journalism in Islamic Magazines in Indonesia Between 1970-1980. *Journal of Indonesian Islam*, *17*(2), 483. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509

Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *7(2)*, 200–216. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813

Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 1–21. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473

Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, *5*(1), 16–33. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056

Saiin, A., Umar, M. H., Badarussyamsi, Hajazi, M. Z., & Yusuf, M. (2023). THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau. *Al-Ahwal*, *16*(2), 320–341. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207

Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims’ Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *15*(2), 98–118. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544

Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, *57*(3), 102–112. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9

Umar, M., & Sukarno, S. (2022). The influence of fiqh insights and science literacy on student ability in developing Quran-based science. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *11*(2), 954–962. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i2.22012

Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, *14*(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLcung\_d2U

Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *26*(1), 247–264. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158

Willyandari, N. O., Rosmanidar, E., & Safitri, Y. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Transportasi pada Indeks Saham Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 11422-11432.* [*https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099*](https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099)

Pertiwi, M. E., Nengsih, T. A., & Safitri, Y., Ramli, F. (2024). DAMPAK RELOKASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMUR). *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI DAN BISNIS*, 3(1), 112-135. https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i1

Safitri, Y., Ramli, F., & Mawaddah, F. (2023).[IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN INCREASING COMMUNITY WELFARE IN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cgrY5j4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=cgrY5j4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC). Sustainability: Theory, Practice and Policy, 1(1), 68-80. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1840>

Ramli, F., & Safitri, Y. (2022). Analysis of the Effect of Natural Resources on the Quality of Human Development through Jambi Province Capital Expenditures. Sustainability: Theory, Practice and Policy, 2(2), 111-222. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v2i2.1454>

Nurhayati, N., Rosmanidar, E., & Ramli, F. (2024). Pengaruh Jumlah Produksi, Biaya Produksi dan Etos Kerja Islam Terhadap Pendapatan Petani Karet di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu. *eCoa-Buss, 6(3),* 1315-1327. https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1179

Putri, A., Baining, M. E., & Ramli, F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa Menjadi Enterpreneur Syariah. *JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(30, 35-54. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.211

Martaliah, Nurfitri,, Anita, Efni., Rahman, Fuad, & Naufal ramli, Luthfi (2023). *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPMTerhadap Kemiskinandi Provinsi Jambi Periode2010-2021*. IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 8, Number2, December 2023, 334-344. E\_ISSN: 2540-9506 P\_ISSN: 2540-9514http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb

Yudana, T., & Martaliah, N. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan. KONTEKSTUALITA P-ISSN: 1979-598X Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan E-ISSN: 2548-1770 Vol. 35 No. 1, Juni 2020 DOI: 10.30631/35.1.55-64

Kurniawan Dandi, Mubyarto Novi & Rohana Rohana. 2024  *Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ANWARUL Jurnal Pendidikan dan Dakwah,* [*https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832*](https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832)

Farhan Hamudi, Ahsan Putra Hafidz, Nova Erliyana, 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Aurduri Kota Jambi. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika (JUPUMI) Vol.2, No.3 September 2023 E-ISSN : 2808-9014, P-ISSN 2808-9359, DOI: <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i3.2153>

Siddiqi, M., Prayogo, Youdhi & Martaliah, Nurfitri, 2023 *Pengaruh Literasi, Edukasi Dan Self Efficacy Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).*Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.5 September 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 213-234 DOI: <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5>

Rahmah, M., Kurniawan, B., & Rohana, R. (2024). PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL, INVESTASI, DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 774-786. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1650

Ardiansyah, M. Z., Anita, E., & Rohana, R. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Usaha dan Strategi Pemasaran Syariah terhadap Pendapatan pada Usaha Kukus Bungkus Official Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 18728-18737. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15129

Judijanto, L., Utami, E. Y., Sudarmanto, E., Erliyana, N., & Said, S. (2024). The Effect of Regional Financial Networks on Banking System Stability in Indonesia: A Literature Review of Linkages, Risks, and Impacts in a Macroeconomic Context. Sciences du Nord Economics and Business, 1(01), 26-32. https://north-press.com/index.php/sneb

Zakaria, Z., Saiful, N. A. Q., Santoso, Ekbal., Erliyana, N., & Utami, E. Y. (2023) THE INFLUENCE OF LIFESTYLE, PRICE, BRAND IMAGE, PACKAGING QUALITY AND PRODUCT QUALITY ON PURCHASE INTEREST OF STARBUCKS CANNED PRODUCTS CUSTOMERS. *JURNAL SCIENTIA*, 12(3), 3961-3966. https://doi.org/10.58471/scientia.v12i03.1825

Erliyana, N., & Alawiyah, R. (2022). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat RT. 28 Kelurahan Kenali Asam Bawah Jambi. *COMMUNIO:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 102-106. https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jpkm/article/view/34*

Pangindaran, D. P., Ningsih, P. A., & Rohana, R. (2024). PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MELALUI APLIKASI TIKTOK SHOP PADA MAHASISWA UIN STS JAMBI TAHUN 2023. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.274>

Qutni, M. D., Miftah, A. A., & Martaliah, N. (2024). KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (MUKHABARAH) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 246-260. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.348>